



# POLICY BRIEF

## Penguatan Pelayanan Posyandu Menjawab Tantangan Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kumuh Kota Makassar Selama Pandemi Covid-19

Sandra Frans dan Siti Nurfadillah

### Ringkasan Eksekutif

Kader posyandu di pemukiman kumuh sebenarnya dapat menjawab tantangan permasalahan kesehatan masyarakat terkait ibu dan anak yang terjadi selama pandemi Covid-19. Hanya saja, permasalahannya adalah lemahnya pemberdayaan posyandu baik itu kapasitas kader maupun sistem pemantauan dan koordinasi yang menyebabkan kurang optimalnya peran posyandu sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi kesehatan dasar di wilayah kumuh perkotaan di masa pandemi Covid-19. Penyebabnya adalah kurangnya dukungan dari elemen terkait termasuk pemerintah setempat terhadap pelaksanaan posyandu. Rekomendasinya adalah pembuatan media KIE yang mudah dipahami kader dalam pelaksanaan penjangkauan warga, melibatkan lurah sebagai manajer KIA dan pembuatan sistem pemantauan pelaksanaan posyandu untuk kelurahan.

### Target Policy Brief

Dinas Kesehatan Kota Makassar,  
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan,  
Bappeda Kota Makassar,  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Makassar,  
Organisasi Masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan.

### PERMASALAHAN

Situasi pandemi Covid-19 telah mempengaruhi pelayanan sistem kesehatan yang mengarah ke perubahan sistem yang lebih kompleks dan penuh tantangan di mana pelayanan kesehatan harus berganti penjangkauannya<sup>1</sup>. Studi menunjukkan bahwa respon terhadap Covid-19 memiliki asosiasi negatif terhadap status kesehatan ibu dan anak, dan ini dapat menjadi semakin lebih buruk<sup>2</sup>. Permasalahan ini diprediksi akan semakin lebih berat dampaknya untuk masyarakat yang tinggal di populasi yang sulit terjangkau misalnya di daerah kumuh perkotaan, termasuk di kota Makassar, kota pelabuhan besar yang ada di bagian tengah Indonesia.

Perlu diketahui, persoalan yang dihadapi sehari-hari di wilayah kumuh antara lain, masalah sanitasi dan pembuangan limbah yang menyebabkan rentan terjadi diare, cacingan dan tifus, anak-anak mudah mengalami gizi buruk dan terinfeksi penyakit menular, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang tidak memadai<sup>3,4</sup>. Penelitian Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) bekerja sama dengan UNICEF mengenai imunisasi anak di wilayah kumuh kota Makassar menunjukkan bahwa walaupun penerimaan vaksin sudah cukup tinggi, akan tetapi hampir setengah dari anak-anak usia kurang dari satu tahun belum imunisasi tepat pada waktunya. Hal ini disebabkan karena pengetahuan akan kegunaan imunisasi yang masih kurang. Keadaan ini semakin berat sejak adanya pandemi Covid-19.

Permasalahan berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak yang ada di populasi yang sulit terjangkau termasuk di wilayah kumuh ini bisa teratasi dengan penguatan sistem kesehatan berbasis komunitas. Hal ini sudah didukung oleh studi di Nepal maupun di Etiopia di mana kader kesehatan yang telah mendapatkan *training* yang sesuai berfungsi sebagai penggerak dalam menyalurkan suplemen bernutrisi, edukasi kesehatan, vaksin dan layanan kesehatan masyarakat lainnya<sup>5,6</sup>. Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki modal kuat dalam sistem kesehatan berbasis masyarakat yaitu melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan<sup>7</sup>. Hanya saja pengembangan Posyandu terutama di wilayah kumuh masih menemui banyak kendala. Perlu ada suatu intervensi khusus yang melibatkan elemen penting dalam masyarakat untuk penguatan pelayanan posyandu di masa pandemi Covid-19.

## IDENTIFY UNDERLYING FACTORS

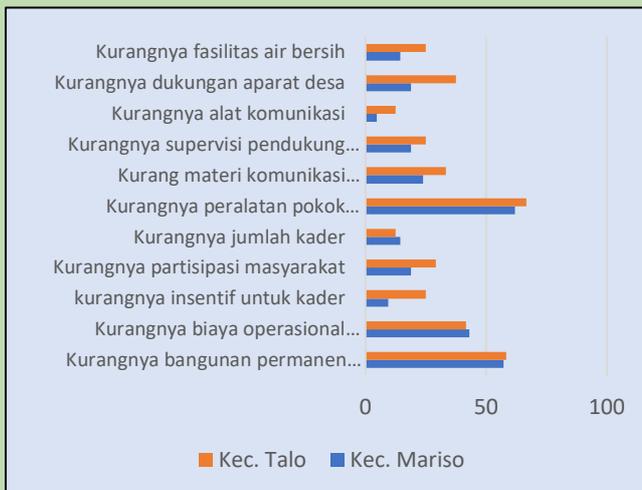
Berdasarkan hasil penelitian kami, ada beberapa faktor yang menyebabkan masih lemahnya posyandu dalam mendukung layanan kesehatan ibu dan anak berbasis masyarakat. Antara lain:

- Kami melihat bahwa keinginan kader posyandu dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di wilayah kumuh Kota Makassar sudah cukup tinggi, namun seringkali kader kurang kapasitas dan sarana pendukung. Berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus yang dilakukan dengan kader, mereka menginginkan adanya pembangunan kapasitas yang rutin terhadap kader posyandu sebagai perlengkapan mereka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

*“Perlu peningkatan kapasitas untuk kader, pelatihan kader” Kader Kecamatan Mariso*

*“Kami butuh (buku) pegangan untuk kader” Kader Kecamatan Tallo*

- Masalah lain yang dapat mempengaruhi pekerjaan kader yang menjadi responden kami di pemukiman kumuh kota Makassar terangkum di dalam tabel berikut ini:



*Grafik 1. Masalah yang Mempengaruhi Kader Posyandu.*

Dari grafik tersebut, terlihat bahwa lebih dari setengah posyandu tidak memiliki bangunan permanen. Apalagi di daerah kumuh yang padat dan berdesakan, masalah bangunan menjadi suatu hal yang penting. Biaya operasional kader juga menjadi suatu tantangan selain dari masalah kurangnya peralatan pokok untuk pelaksanaan tugas posyandu yang dihadapi oleh dua pertiga posyandu. Di kecamatan Tallo, 37% posyandu mengeluhkan kurangnya dukungan dari aparat desa dalam pelaksanaan posyandu.

- Dukungan keterlibatan pemerintah desa setempat sebagai *supporting system* dalam kegiatan posyandu haruslah menjadi suatu hal yang digarisbawahi. Mengingat posyandu adalah milik dari desa. Di tambah lagi berdasarkan Buku Pedoman Posyandu sudah ditetapkan peran dari pemerintah setempat termasuk Camat dan Lurah atau Kepala Desa termasuk Memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untuk penyelenggaraan Posyandu serta melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu secara teratur juga mengkoordinasi peran kader posyandu dan memantau jalannya posyandu. Kader-kader di wilayah penelitian kami juga mengidentifikasi masalah tersebut.

*“Bagus kalau ada pertemuan rutin upaya bersinergi antara pemerintah setempat dengan puskesmas. Akurat datanya misal ibu hamil, sampai lahir, meninggal. Karena kalo kita tanya ke kelurahan, ada warga kena penyakit ini mereka pasti tidak tahu karena bukan kader”*

*“Kalau bisa ada pertemuan RT RW lurah dan kader, ada istilahnya posyandu care. Yang kita dapatkan yang tidak selesai di bawah dilaporkan pak lurah agar dibahas di pertemuan.”*

## APA YANG TERJADI JIKA MASALAH DIABAIKAN?

Jika tidak dilakukan penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat melalui posyandu, maka konsekuensinya, beberapa permasalahan kesehatan ibu dan anak yang seharusnya bisa dicegah di level masyarakat malah semakin memburuk.

- Pertama, studi terdahulu membuat sebuah pemodelan yang memprediksikan bahwa prevalensi gizi buruk yang akan semakin meningkat dengan adanya pandemik Covid-19<sup>8</sup>. Sedangkan layanan gizi misalnya penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan dan konseling gizi, pemberian makanan tambahan (PMT) lokal, suplementasi vitamin A dan tablet Fe bisa dilakukan di posyandu.
- Kedua, pandemik ini juga mengakibatkan cakupan imunisasi yang menurun yang akan memicu terjadinya kejadian luar biasa untuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi<sup>9</sup>. Padahal, layanan imunisasi umumnya bisa dilakukan di posyandu, karena petugas puskesmas secara rutin datang ke posyandu. Di satu sisi, sejak pandemik covid-19 ini, sempat terhenti layanan imunisasi di posyandu karena

menghindari kerumunan orang. Akibatnya, masyarakat yang tinggal jauh dari puskesmas kesulitan mengakses layanan imunisasi di puskesmas karena harus mengeluarkan biaya untuk transportasi.

- Ketiga, kondisi pembatasan layanan saat Covid-19 ini juga mengakibatkan berkurangnya akses terhadap layanan keluarga berencana yang dapat menyebabkan terjadinya kehamilan beresiko<sup>10</sup>. Semua hal ini akan mengarah pada kesehatan masyarakat di wilayah kumuh perkotaan menjadi semakin terancam.
- Keempat, pemukiman kumuh memungkinkan untuk terjadinya peningkatan penyebaran pandemik covid-19 dan terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahannya seperti, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, kemiskinan, padatnya wilayah pemukiman warga. Di satu sisi, kader posyandu sebagai frontliner pelayanan kesehatan dasar memiliki kapasitas dan sarana pendukung yang minim untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak di masa pandemic serta pencegahan pandemi covid-19 kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat di wilayah kumuh akan minim pengetahuan terkait covid yang dapat mengakibatkan masyarakat kumuh akan terancam dengan penurunan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan penyebaran kasus covid-19.

## AGENDA KEBIJAKAN APA YANG HARUS DILAKUKAN?

Selama masa pandemik Covid-19 ini, peneliti PKMK FK-KMK UGM melibatkan Dosen Kesehatan Masyarakat dari Universitas Hassanudin didukung oleh Unicef Makassar melakukan diskusi secara terus menerus dengan kader posyandu, ibu bayi dan balita, puskesmas setempat, Dinkes Kota Makassar juga Bapedda Kota Makassar untuk dapat mengatasi permasalahan di atas. Adapun agenda kebijakan yang sedang dilakukan adalah

1. Membuat media KIE yang bergambar dan mudah untuk dipahami dalam bentuk lembar balik yang memuat informasi mengenai kesehatan ibu dan anak selama masa pandemik Covid-19. Pembuatan lembar balik ini melibatkan kader secara aktif untuk memberikan masukan baik itu dari hal materi maupun presentasi dari media KIE tersebut. Selain itu, telah diadakan pelatihan komunikasi efektif dan juga komunikasi beresiko untuk membangun kapasitas kader dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

2. Melakukan advokasi kepada kelurahan dan kecamatan mengenai aktifitas untuk penguatan pelayanan posyandu. Dalam hal ini membuat Surat Kesepakatan Bersama yang melibatkan Lurah, Camat dan Kepala Puskesmas untuk menunjuk lurah sebagai Manajer KIA yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasi dan mengelola kegiatan posyandu.
3. Untuk mendukung kegiatan nomer 2, maka dibuat Sistem Pemantauan Pelaksanaan Posyandu untuk Kelurahan. Hal ini penting karena selama ini, sistem informasi posyandu hanya diketahui oleh Puskesmas saja dan tidak oleh kelurahan. Dengan ini, diharapkan kelurahan akan lebih mudah melakukan monitoring dari kegiatan posyandu dan tidak kesulitan saat melakukan evaluasi.

## REFERENCES

1. Ferrara, P., & Albano, L. (2020). COVID-19 and healthcare systems: what should we do next?. *Public Health*, 185, 1.
2. Akseer, N., Kandru, G., Keats, E. C., & Bhutta, Z. A. (2020). COVID-19 pandemic and mitigation strategies: implications for maternal and child health and nutrition. *The American journal of clinical nutrition*, 112(2), 251-256.
3. Ezeh, A., Oyebo, O., Satterthwaite, D., Chen, Y. F., Ndugwu, R., Sartori, J., ... & Caiiffa, W. (2017). The history, geography, and sociology of slums and the health problems of people who live in slums. *The lancet*, 389(10068), 547-558.
4. Sclar, E. D., Garau, P., & Carolini, G. (2005). The 21st century health challenge of slums and cities. *The Lancet*, 365(9462), 901-903.
5. Tasic, H., Akseer, N., Gebreyesus, S. H., Atallahjan, A., Brar, S., Confreda, E., ... & Mohammedsanni, A. (2020). Drivers of stunting reduction in Ethiopia: a country case study. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 112(Supplement\_2), 875S-893S.
6. Conway, K., Akseer, N., Subedi, R. K., Brar, S., Bhattarai, B., Dhungana, R. R., ... & Thakur, D. N. (2020). Drivers of stunting reduction in Nepal: a country case study. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 112(Supplement\_2), 844S-859S.
7. Depkes, R. I. (2019). Pedoman umum pengelolaan posyandu.
8. Robertson, T., Carter, E. D., Chou, V. B., Stegmuller, A. R., Jackson, B. D., Tam, Y., ... & Walker, N. (2020). Early estimates of the indirect effects of the COVID-19 pandemic on maternal and child mortality in low-income and middle-income countries: a modelling study. *The Lancet Global Health*.
9. Chandir, S., Siddiqi, D. A., Setayesh, H., & Khan, A. J. (2020). Impact of COVID-19 lockdown on routine immunisation in Karachi, Pakistan. *The Lancet Global Health*, 8(9), e1118-e1120.
10. Riley, T., Sully, E., Ahmed, Z., & Biddlecom, A. (2020). Estimates of the potential impact of the COVID-19 pandemic on sexual and reproductive health in low-and middle-income countries. *Int Perspect Sex Reprod Health*, 46, 46.

\*Tim penulis Policy Brief: Sandra Frans dan Siti Nurfadillah (PKMK FK-KMK UGM).

Tim peneliti: Sandra Frans, Faisal Mansur, Siti Nurfadillah, Shanti Riskiyani (Universitas Hasanuddin), Siti Salmah, Muliana Muhiddin (Unicef Makassar).

Studi ini didukung oleh UNICEF Indonesia